



# BPK Serahkan Laporan Pemantauan Semester II/2013

Borneo Tribune, Pontianak  
Setelah melakukan penelaahan terhadap dokumen tindak lanjut yang disampaikan oleh seluruh entitas kepada BPK, untuk menentukan status tindak lanjut rekomendasi apakah telah sesuai, belum sesuai, atau belum ditindaklanjuti pada tanggal 6 hingga 8 Januari yang lalu, hari ini bertempat di aula perwakilan, BPK mengundang seluruh Ketua DPRD, Kepala Daerah dan Inspektur di Kalbar untuk menghadiri Penyerahan Laporan Pemantauan Tindak

Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Kerugian Daerah Semester II Tahun 2013.  
Kepala Perwakilan BPK Kalbar, Didi Budi Satrio, menyampaikan sampai dengan semester II tahun 2013, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah menghasilkannya 3.263 temuan atau mengalami penambahan jumlah temuan sebanyak 163 temuan, dan 6.955 rekomendasi atau mengalami penambahan jumlah rekomendasi sebanyak 449 rekomendasi.

"Penambahan jumlah temuan dan rekomendasi tersebut adalah dari hasil pemeriksaan semester II tahun 2013," kata Didi Budi Satrio, Kamis (13/2) lalu.  
Dikatakannya, Hasil pemantauan dan penelaahan yang dilakukan terhadap BPK adalah 4.465 rekomendasi yang dikeluarkan atau sebesar 63,89 persen dari total rekomendasi, 1.914 rekomendasi atau sebesar 27,36 persen tindak lanjut belum sesuai dengan reko-

mendasi, dan 584 rekomendasi atau sebesar 8,35 persen belum ditindaklanjuti, serta 32 rekomendasi atau sebesar 0,46 persen tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.  
"Dari hasil rekapitulasi tindakan lanjut atas rekomendasi tersebut, telah dilakukan penyerahan aset atau penyerahan uang ke kas negara/daerah sebesar Rp 152,33 milyar," jelasnya. Atas hasil yang telah dicapai tersebut, BPK RI memberikan apresiasi kepada seluruh Pemerintah Daerah se-Kalbar yang terus berusaha

keras untuk selalu menjaga konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Kepada beberapa pemerintah daerah yang menurut catatan BPK capaian status telah sesuai rekomendasinya masih di bawah 50 persen, dan diharapkan dapat lebih inten-

sif untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan demi meningkatkan peran dan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.  
"Sehubungan dengan laporan hasil pemantauan atas kerugian negara/daerah yang juga diserahkan secara bersamaan,

saya berharap agar tim penyelesaian kerugian daerah dapat terus aktif untuk menindaklanjuti kasus-kasus kerugian daerah di wilayahnya masing-masing dan melaporkannya kepada BPK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," ujarnya. (Lay).